

Judul : Museum Daerah Perlu Campur Tangan Pusat
Tanggal : Rabu, 24 April 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Museum Daerah Perlu Campur Tangan Pusat

Sentuhan teknologi informasi dan digitalisasi penting agar museum tetap relevan dan interaktif, terutama bagi generasi Z.

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan museum belum menjadi prioritas, terutama di daerah dengan keuangan terbatas. Dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat untuk mengembangkan museum daerah dengan meningkatkan fasilitas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Pembentukan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya atau Indonesian Heritage Agency (BLU MCB/IHA) oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) diharapkan dapat mentransformasi pengelolaan museum. Badan ini mengelola 18 museum dan 34 cagar budaya nasional.

Museum dan cagar budaya tersebut, di antaranya, Museum Nasional, Galeri Nasional Indonesia, Museum Sumpah Pemuda, Museum Batik Indonesia, Museum Prasejarah Sernedjo Tegol, dan Museum Prasejarah Sangiran. Ada juga Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCRN) Muarajambi, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Gunung Padang, Situs Lesang Timpuseng, dan Benteng Duurstede. Lokasinya tersebar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku.

Transformasi pengelolaan tersebut diharapkan dapat diikuti oleh museum-museum yang dikelola pemerintah daerah. Dengan begitu, transformasi terjadi secara lebih menyeluruh sehingga mengoptimalkan fungsi museum dalam mengedukasi masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsis Sutoyo mengatakan, museum daerah sebelumnya berada di ba-

wah Direktorat Permuseum Ditjen Kebudayaan. Lalu, sejak otonomi daerah, pengelolaannya diserahkan kepada pemda.

Kondisi museum di daerah saat ini cukup beragam. Provinsi dengan keuangan memadai dapat mempertahankan dan mengembangkan museum. Namun, daerah dengan keuangan terbatas tidak dapat mengelola museum dengan baik.

Akibatnya, sejumlah museum mati suri. Padahal, museum sebagai tempat edukasi dan rekreasi harus memberikan pelayanan prima dan terkini kepada pengunjung dari berbagai status sosial dan generasi.

"Untuk itu, memang masih perlu campur tangan pusat guna menghidupkan dan mengembangkan museum milik daerah dengan berbagai fasilitas, seperti dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana, agar menjadi museum yang layak dikunjungi di setiap daerah," tuturnya. Selasa (23/4/2024).

Intervensi tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan menentukan skala prioritas. Kerja sama pemerintah daerah dengan BLU MCB sangat mungkin dilakukan lewat berbagai skema pengelolaan.

Marsis menyampaikan, museum sebagai fasilitas publik harus dapat memberikan keleluasaan bagi pengunjung untuk berinteraksi dengan koleksi dan petugas museum. Interaksi bisa dibuat tematik sesuai jenis museum.

"Kelemahan museum kita adalah hanya memajang koleksi yang diberi informasi dipajang dalam lemari kaca, bertahun-tahun dibiarkan demikian. Itulah museum yang menga-

lami stagnasi, tidak pernah berubah dan statis. Akhirnya, pengunjung juga menjadi statis dan apatis," ucapnya.

Media digital

Menurut Marsis, konsep pembaruan dan keharuan sangat penting agar museum tetap relevan dengan kebutuhan. Namun, pengembangannya mesti tetap mencerminkan ciri khas budaya daerah setempat.

Konsep tersebut menjadi dasar transformasi museum untuk bisa melayani generasi Z (kelahiran 1997-2012) sebagai penerus dan pengguna museum di masa mendatang. Sentuhan teknologi informasi dan digitalisasi harus diakomodasi sebagai bagian dari pelayanan dan pengelolaan museum masa depan yang tidak sekadar memajang koleksi dengan diberi label dan poster informasi.

Sajian dan tampilan koleksi dihidupkan melalui media digital. Dengan begitu, pengunjung mendapat berbagai pengetahuan, seperti bagaimana suatu alat atau senjata dibuat, digunakan, dan dibawa oleh masyarakat penggunaannya.

Tayangan digital seperti ini menjadi kebutuhan museum di masa depan. Dapat menghadirkan suasana seolah-olah kenyataan, padahal itu hanya permainan digital," katanya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan, BLU MCB diharapkan menjadi contoh dalam pengelolaan museum yang profesional dan fleksibel dalam finansial. Ia mengatakan, pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemda untuk mendorong pengelolaan museum dengan metode BLU.

"Kalau di daerah malah lebih mudah bikin BLU. Dari segi regulasi sudah oke. Cuma mungkin itu soal visi. Museum belum dilihat sebagai institusi yang fungsinya baik dari segi pendidikan, sosial, bahkan untuk ekonomi juga bisa jalan," ujarnya.

Hilmar berharap pembentukan BLU MCB dapat memicu transformasi pengelolaan museum di daerah. Karena itu, ia mendorong pemda memberi ruang kepada sumber daya manusia muda untuk berinovasi dalam mengelola museum. Bahkan, pihaknya membuka kesempatan bagi pemda untuk bekerja sama.

"Kami tidak akan mengambil asetnya. Manajemennya oleh IHA atau BLU MCB. Soal hasilnya, karena sama-sama pemerintah, itu sangat mungkin untuk disepakati," katanya.

Pembentukan BLU MCB juga diharapkan meningkatkan interaksi pengunjung dengan koleksi museum dan cagar budaya. Jadi, ketika berkunjung masyarakat tidak sekadar melihat-lihat benda bersejarah, tetapi juga mendapatkan pengetahuan serta pengalaman budaya yang bermakna.

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Bondan Kusumayoso mengatakan, koleksi museum di Indonesia sering sekali ditampilkan tanpa konteks. Oleh sebab itu, diperlukan narasi yang melekat pada setiap koleksi benda bersejarah di museum. "Ritual ritual yang berkaitan dengan koleksi museum dan cagar budaya jangan dibiarkan, tetapi difasilitasi. Ini yang akan membuat museum kita hidup," ujarnya. (TAM)